

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Literasi Politik

1. Defenisi Literasi Politik

Literasi berasal dari bahasa Inggris, *literacy*. Asal kata *literacy* dari kata latin 'littera' yang berarti *letter* atau huruf, sehingga *literacy* sering diterjemahkan sebagai melek huruf. Huruf sama artinya dengan aksara, maka diperkenalkanlah istilah keberaksaraan untuk memperhalus istilah melek huruf.¹

Secara umum, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan individu mengolah dan memahami informasi saat membaca atau menulis. Oleh karena itu, literasi tidak terlepas dari keterampilan bahasa yaitu pengetahuan bahasa tulis dan lisan yang memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan tentang genre dan kultural.²

Bernard Crick dalam tulisannya *Essays on Citizenship* menyatakan bahwa literasi politik sebagai suatu senyawa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang harus dikembangkan bersama, tiap item mengkondisikan dua item lainnya. Dasar literasi politik berarti pemahaman praktis atas konsep-konsep yang digambarkan dari kehidupan dan bahasa sehari-hari. Literasi politik bukan sekedar pengetahuan politik, melainkan cara membuat warga efektif dalam kehidupan publik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif baik resmi maupun yang sifatnya sukarela.³

Merujuk pada Catherine Macrae, dkk (2006), literasi politik adalah bauran kompleks dari praktek-praktek sosial yang memungkinkan orang untuk menjadi warga negara yang aktif dan efektif. Warga komunitas dilengkapi pengetahuan dan tindakan dalam kehidupan mereka dalam kaitannya dengan politik lokal, nasional dan internasional. Mahasiswa melalui pengetahuan, skill dan sikap

¹ Aswita et al., hal. 1.

² Abd Mannan et al., *Pendidikan Literasi* (Yogyakarta: Selat Media Partners, 2023), hal. 2.

³ Heryanto, *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, hal.

politiknya tak sekedar melek tetapi juga perlu berpartisipasi aktif dalam arus perubahan politik yang semakin dinamis.⁴

Menurut Jenni S Bev, literasi politik mengacu kepada seperangkat keterampilan yang diperlukan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan masyarakat. Singkatnya, ada kemampuan untuk mandiri di depan pemerintah. Hal ini tidak berarti bertujuan untuk menjadi seorang politisi karir, tetapi untuk berpikir dan bertindak sebagai konstituen informasi. Sehingga para pejabat pemerintah tidak bisa menjadi siapa mereka tanpa kita (Heryanto, 2012: 117-118).⁵

2. Fungsi Literasi

Menurut Doyle, terdapat beberapa fungsi dari literasi, diantaranya adalah:⁶

- a. Menentukan informasi yang akurat dan lengkap yang akan menjadi dasar dalam membuat keputusan;
- b. Menentukan batasan informasi yang dibutuhkan;
- c. Memformulasikan kebutuhan informasi;
- d. Mengidentifikasi sumber informasi potensial;
- e. Mengembangkan strategi penelusuran yang sukses;
- f. Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien;
- g. Mengevaluasi informasi;
- h. Mengorganisasikan informasi;
- i. Menggabungkan informasi yang dipilih menjadi dasar pengetahuan seseorang; dan
- j. Menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu

⁴ Gun Gun Heryanto, *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 232.

⁵ Bakti et al., hal. 59–60.

⁶ Aswita et al., hal. 3.

3. Aspek-Aspek Literasi Politik

Praktik literasi politik merupakan satu diantara simpul kekuatan politik warga negara. Literasi politik bukanlah semata konsep normatif melainkan bauran antara pengetahuan, skill dan sikap politik.⁷

a. Pengetahuan Politik

Ridley dalam Brownhill and Smart (1989) mengatakan bahwa pengetahuan politik adalah kekuatan yang dapat membawa pada demokratisasi masyarakat, tetapi pendekatan pendidikan politik yang tradisional sudah tidak relevan lagi, maka tujuannya harus praktis, difokuskan pada pendidikan politik yang berorientasi peran sehingga pendidikan politik dapat membantu kelompok yang kurang beruntung menjadi beruntung.⁸

Ada beberapa jenis pengetahuan yang idealnya dimiliki seseorang dan hal tersebut secara politik akan membuat masyarakat melek politik, antara lain adalah:⁹

- 1) Informasi mendasar tentang sejumlah isu; siapa yang memegang kekuatan, dari mana uang tersebut datang, bagaimana sebuah institusi berjalan,
- 2) Bagaimana untuk menjadi terlibat secara aktif menggunakan pengetahuan dan memahami kealamian isu,
- 3) Bagaimana untuk memprediksi jalan yang paling efektif atas penyelesaian isu,
- 4) Bagaimana untuk mengenali seberapa baik objektivitas kebijakan telah diraih dan isu-isu yang ada sudah beres,
- 5) Bagaimana untuk memahami pandangan orang lain dan justifikasi mereka untuk aksi mereka

b. Keterampilan Politik (*political skill*)

⁷ Bakti et al., hal. 60.

⁸ Hariyanti dan Hambali, *Strategi Pendidikan Pemilih: Teori dan Praktik* (Koto Baru: CV. Mitra Cendekia Media, 2023), hal. 29.

⁹ Heryanto, *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, hal. 89.

Keterampilan politik adalah kemampuan untuk secara efektif memahami orang lain di tempat kerja dan menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan tujuan sendiri. Orang dengan keterampilan politik yang kuat memiliki kualitas sebagai berikut:¹⁰

- 1) Mereka mudah membayangkan diri mereka dalam posisi orang lain atau mengambil sudut pandang orang lain.
- 2) Mereka dapat memahami situasi dan menentukan respon terbaik. Mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan Situasi.
- 3) Mereka mengembangkan jaringan yang besar, dan dikenal oleh banyak orang.
- 4) Mereka dapat dengan mudah mendapatkan kerjasama dari Orang Lain.
- 5) Mereka membuat orang lain merasa nyaman. Individu dengan keterampilan politik yang kuat dapat menggunakannya untuk keuntungan organisasi (misalnya, mendapatkan kerja sama dari berbagai kelompok), menggunakan keterampilan politik untuk keuntungan politik sendiri, bagaimanapun, dapat membahayakan organisasi. Oleh karena itu, keterampilan politik dapat bersifat positif, tetapi hanya jika digunakan untuk mencapai tujuan yang sesuai.

c. Sikap Politik

Sikap politik merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap politik muncul setelah orang melihat, memahami dan menghayati apa dan bagaimana kegiatan politik itu, sehingga kemudian membuat tindakan untuk melakukan pilihan. Sikap politik merupakan pre-disposisi atau kecenderungan bertindak secara politik, yang masih bersifat internal (Sastroatmodjo 1995).¹¹

¹⁰ Michael A Hitt et al., *Organizational Behavior (Fifth Edition)* (Hoboken: Wiley, 2017), hal. 417.

¹¹ Jhon Retei Alfri Sandi, *Lembaga Adat dan Hak-Hak Masyarakat Dayak Dalam Pusaran Politik: Studi Kasus Kalimantan Tengah 2011-2016* (Banten: An1Mage, 2019), hal. 17.

4. Dampak Meningkatkan Literasi

Dampak dari literasi akan membawa setiap orang untuk meningkatkan diri dengan literasi. Dengan meningkatkan literasi akan menjadi sesuatu yang berguna. Dampak literasi akan bisa memberikan nilai utama dalam kehidupan. Berikut dampak-dampak yang dapat dinikmati bagi orang yang tekun di dalam literasi:¹²

a. Membuat setiap orang berpikir dengan sangat kritis

Ketika setiap orang punya cara berpikir kritis dengan baik. Maka berpikir kritis adalah keniscayaan tersendiri dan cara agar meningkatkan *skill* di dalam kehidupan.

b. Tidak mudah terpancing hoax

Salah satu yang menjadi unik dan penting dalam kehidupan adalah berita-berita hoax yang merajalela sana sini. Jelas hoax adalah musuh terbesar dalam dunia informasi dan setiap negara. Karena memberitakan berita yang salah. Ketika berita itu salah bisa dipakai sebagian besar oknum untuk mendapatkan keuntungan dan ini yang menjadi musuh bagi semua orang.

c. Memberikan keuntungan dan kebanggaan pribadi

Salah satu yang menjadi unik dan penting adalah keuntungan dan kebanggaan pribadi. Ketika seseorang berhasil untuk membaca dan menaikkan pengetahuan, maka dampaknya adalah kebahagiaan, untung, dan kebanggaan terhadap diri sendiri karena bisa membawa diri untuk jauh lebih baik.

d. Meningkatkan skill pribadi dan orang lain

Literasi dengan segala pelatihannya akan membawa kepada diri sendiri untuk sungguh-sungguh. Dalam literasi kita bisa membawa *skill* semakin meningkat dan membawa orang lain untuk sungguh-sungguh mengenal literasi. Ketika literasi menjadi nilai utama dalam kehidupan dan *skill* yang membawa orang untuk mengenal *skill* lebih baik.

¹² Nahason Bastin, *Keterampilan Literasi, Membaca, dan Menulis* (Sidoarjo: Nahason Bastin Publishing, 2022), hal. 142–43.

5. Pentingnya Kegiatan Literasi Politik

Ada tiga alasan mengapa kegiatan literasi politik diperlukan antara lain:¹³

- a. Pertama, kegiatan literasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam penguatan dan pemberdayaan politik warga negara, terutama dalam mengedukasi hak-hak politik warga negara sehingga memahami benar posisinya di antara berbagai kekuatan politik yang ada.
- b. Kedua, kegiatan literasi politik kerap direduksi oleh berbagai faktor antara lain desain institusional serta tipe kekuasaan eksekutif, kontestasi pada kekuasaan legislatif, kartelisasi politik dan praktik demokrasi kolusif, serta menguatnya distorsi politik media.
- c. Ketiga, literasi politik itu bukanlah sebatas wacana (discourse). melainkan, perpaduan antara pengetahuan yang memadai, keterampilan dalam pencarian dan komparasi informasi politik, sekaligus juga sikap politik mereka terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Heryanto, 2011: 194-195).

6. Meningkatkan Literasi Politik

Menurut Ustman Abdul Muiz Ruslan (2010:96), kesadaran politik dapat dicapai melalui beberapa cara yakni:¹⁴

- a. Arahan politik langsung, baik melalui jalur formal maupun nonformal melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan dan pengajaran langsung yang dilakukan oleh pakar pemikir dan pemimpin-pemimpin politik
- b. Pengalaman-pengalaman politik yang didapatkan melalui partisipasi politik
- c. Kesadaran yang muncul dari belajar secara mandiri. Misalnya membaca koran dan buku-buku politik serta mengikuti berbagai peristiwa dan perkembangan politik
- d. Kesadaran yang muncul melalui dialog-dialog kritis

¹³ Bakti et al., hal. 60.

¹⁴ Hariyanti dan Hambali, hal. 25–26.

- e. Ditambah dengan kesadaran politik yang merupakan hasil dari dua metode, *apprenticeship* dan generalisasi maka seluruh metode ini mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesadaran politik.

B. Ilmu Politik

1. Defenisi Ilmu Politik

Ilmu Politik yaitu suatu ilmu yang menyelidiki lembaga-lembaga politik (*political institutions*), seperti negara, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain. Ilmu Politik sebagai ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk, dan proses-proses negara dan pemerintah. Serta ilmu Politik juga sebagai ilmu untuk mengenal negara dan pemerintah, menyelidiki cara bekerja pemerintah, fungsi-fungsi pemerintah dan menentukan azas-azas untuk membimbing pemerintah dan pekerjaannya.¹⁵

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa politik itu adalah usaha masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Hanya sesingkat itu. Wujud kesejahteraan itu berupa kebaikan, keteraturan, kedamaian, keadilan, kehidupan yang lebih baik, tentram, keindahan, harmonisasi dan sebagainya. Politik adalah suatu keadaan hidup manusia yang ideal dan inti politik hanya satu: menciptakan kesejahteraan umat manusia.¹⁶

2. Sifat Ilmu Politik

Pada dasarnya ilmu politik bersifat membahas proses proses yang berlangsung dalam suatu negara, seperti kekuasaan dan susunan masyarakat mengenai ilmu politik tersebut. Maka dapat dirumuskan sifat ilmu politik antara lain:¹⁷

- a. Menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan

¹⁵ Sakti, hal. 8.

¹⁶ Jafar Ahmad, *Ilmu Politik Praktis (Dari Teori ke Implementasi)* (Jambi: PT. Akademia Virtual Media, 2021), hal. 4.

¹⁷ Sakti, hal. 6–7.

- b. Mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana yang baik dan mana yang salah dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang.
- c. Mempelajari tingkah laku politik warga negara, baik secara pribadi maupun kelompok
- d. Mengamati dan menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, dan kerja sama internasional.

3. Konsep Pokok Ilmu Politik

Dalam Politik juga terkandung konsep-konsep pokok, yakni:¹⁸

- a. Negara (*State*)
Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya
- b. Kekuasaan (*Power*)
Kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku
- c. Pengambilan Keputusan (*Decision making*)
Membuat pilihan diantara berbagai alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai
- d. Kebijakan (*Policy*)
Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu
- e. Pembagian (Distribusi)
Pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat

¹⁸ Sakti, hal. 4.

4. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lain

Ilmu politik memiliki hubungan yang erat dengan ilmu pengetahuan lainnya seperti:¹⁹

a. Ilmu Sosiologi

Ilmu politik merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan sosial, yang erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Keterkaitan itu terutama untuk menjelaskan sebuah fenomena atau peristiwa politik yang terjadi sehari-hari.

b. Ilmu Sejarah

Memahami ilmu sejarah dengan benar adalah kunci terbaik dalam memahami peristiwa politik. Sejarah merupakan instrumen yang dapat menyumbang data dan fakta masa lalu dan itu menjadi hal terpenting dalam memahami ilmu politik. Inilah keterkaitan antara sejarah dan ilmu politik. Berkaitan dengan sejarah, maka politik itu adalah ikhtiar mempelajari tentang perjalanan sejarah manusia. Sehingga tonggak penting dalam politik harus dilihat sebagai sebuah proses interaksi dari tonggak satu dengan tonggak lainnya.

c. Ilmu Filsafat

Filsafat merupakan cabang ilmu sosial lainnya yang sangat berkait erat dengan ilmu politik. keterkaitan ilmu politik dan filsafat adalah menyangkut kehidupan politik mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari negara. Dalam pandangan filsuf Yunani kuno, filsafat politik juga menyangkut tentang moral dan etika. Etika membahas persoalan yang menyangkut norma-norma baik/buruk, apa itu keadilan dan lain sebagainya (Miriam Budiardjo, 2008:27).

d. Ilmu Antropologi

Ilmu antropologi merupakan penyumbang terpenting berikutnya untuk menganalisis sebuah peristiwa politik. Memahami antropologi bagi seorang ilmuwan politik, sama pentingnya dengan mempelajari ilmu sosial lainnya.

¹⁹ Ahmad, hal. 195–219.

Menurut Mirim Budiardjo, dalam politik, ilmu antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan social budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi yang lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan pedalaman, dapat digunakan oleh ilmuwan politik untuk menganalisis preferensi politik masyarakat desa serta usaha memodernisasi politik Negara. Semua ini didasarkan pada anggapan bahwa masalah daerah, terpecahnya berbagai bentuk desa di pedalaman, perbedaan suku bangsa dan agama pada akhirnya akan dapat di atasi oleh perkembangan kehidupan tingkat nasional. Di sinilah peran penting antropologi bagi ilmuwan politik. Antropologi dapat digunakan untuk membaca struktur sosial serta pola kebudayaan masyarakat yang berbeda-beda, dengan demikian antropologi berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik.

e. Ilmu Ekonomi

Sebagaimana halnya ilmu politik, ilmu ekonomi juga membahas bagaimana cara menyejahterakan rakyat. Membahas Ilmu ekonomi adalah upaya menelisik ketersediaan sumber daya pada sebuah negara. Bukankah sumber daya itu sifatnya sangat terbatas, sehingga ilmu ekonomi dan ilmu politik sama-sama fokus membicarakan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas tadi untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Sumber daya yang dimaksud, meliputi alam, hutan, tanah, air, SDM, dan modal. Yang perlu digaris bawahi, bahwa proses pengalokasian sumber daya kepada kelompok masyarakat itu membutuhkan kekuatan penguasa negara. Membahas mengenai penguasa negara merupakan bagian dari intisari politik. Di sinilah peran penting dan keterkaitan politik dan ekonomi. Melalui sumber daya yang ada, seorang pemimpin memiliki otoritas untuk dapat menentukan jenis barang dan jasa apa yang perlu diproduksi dan bagaimana cara yang digunakan dalam memproduksi barangtersebut. Penguasa politik juga bisa menentukan di mana dan kapan barang jasa diproduksi maupun untuk siapa

barang didistribusikan. Di sinilah mengapa kekuatan politik sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi di suatu negara.

f. Ilmu Psikologi Sosial

Pendekatan psikologi sosial dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala politik dan penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosial dapat digambarkan sebagai berikut: ilmu psikologi khususnya psikologi sosial mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan masyarakat, terutama faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok sosial. Setiap tindakan dan aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Psikologi sosial mengamati semua kegiatan manusia, baik menggunakan analisis dan pendekatan ekstern maupun intern, dengan kedua analisis dan pendekatan tersebut ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran kekuasaan, kondisi sosial ekonomi, serta ciri-ciri kepribadian seseorang yang memungkinkan memainkan peran dalam hal-hal tersebut. Dengan demikian ilmu politik sangat berhubungan dengan ilmu psikologi.

g. Ilmu Geografi

Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang dapat dianalisis dan dijelaskan melalui pendekatan ilmu geografi. Bahkan, perpaduan geografi dan politik telah melahirkan disiplin baru, Geografi politik, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara kehidupan dan aktivitas politik dengan kondisi-kondisi alam dari suatu daerah atau negara. Selain itu, geografi politik juga mempelajari negara sebagai sebuah politik region yang mencakup internal geographical factors ataupun external geographical factors yaitu tentang hubungan antarnegara (Prasetya, 2014:I).

h. Ilmu Hukum

Sebagaimana halnya ilmu politik, ilmu hukum pada dasarnya membahas tentang tata aturan yang bermuara pada keadilan sosial. Bagaimana manusia

dalam kaitannya sebagai makhluk sosial, berjalan beriringan, bekerjasama, tanpa boleh merugikan orang lain. Ketika politik berbicara mengenai bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat, maka hukum mempelajari tentang bagaimana kesejahteraan itu dapat terwujud tanpa ada satupun pihak-pihak yang dirugikan. Dalam konteks kenegaraan, dimana negara menjadi instrumen dalam politik untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, maka hukum hadir untuk memastikan manusia yang mengelola negara tidak menyimpang dari tugas utamanya. Hukum membatasi para penguasa yang memanfaatkan negara dalam rangka memperkaya diri sendiri.

5. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lain

Keputusan politik yang berlangsung di sebuah negara, dirancang sebaik mungkin, agar tidak menjadi sebuah keputusan yang menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak lain. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai (*publics good*), yaitu, mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa. Dalam arti keputusan yang menyangkut kegiatan pemerintah dalam sebuah kekuasaan:²⁰

a. Perwakilan

Sejarah mencatat, upaya manusia sejak dahulu kala, dalam memilih pemimpin sebagai orang yang dipercaya dalam mengelola negara, untuk menciptakan keteraturan di masyarakat itu, telah menjadi perhatian dan pembahasan sangat serius. Dalam satu kelompok kecil, proses pemilihan pemimpin tidak menemui masalah berarti. Nenek moyang manusia biasanya memilih pemimpinnya melalui kesepakatan-kesepakatan, lewat penunjukan langsung dengan berbagai kriteria-kriteria tertentu, semisal kecakapan, kepintaran maupun kekayaan. Seiring perjalanan waktu, ketika kelompok kecil manusia telah berkembang pesat menjadi sebuah komunitas besar,

²⁰ Ahmad, hal. 221–26.

proses pemilihan pemimpin tidak bisa lagi dilakukan secara klasik, yaitu partisipasi rakyat secara langsung.

b. Perwalian

Gagasan perwalian dalam sistem pemerintahan ini dapat ditelusuri sejak 1774, berawal dari pidato Edmund Burke di hadapan rakyat di Bristol. Menurut Burke, esensi dari perwakilan adalah melayani kepentingan dari konstituen dengan mengerahkan pertimbangan yang matang dan pengetahuan yang luas. Singkatnya, perwakilan adalah sebuah tugas moral : mereka yang beruntung memiliki pendidikan dan pemahaman harus bertindak untuk kepentingan-kepentingan dari mereka yang kurang beruntung. Ia menekankan mereka yang beruntung itu sebagai wali atas mereka yang tidak beruntung. Seorang wali adalah seseorang yang bertindak atas nama orang lain berdasarkan kelebihanannya dalam hal pengetahuan, pendidikan atau pengalaman (Heywood, 1997:349).

c. Delegasi

Model delegasi hampir mirip dengan perwalian. Yang sedikit membedakan, delegasi adalah utusan yang berasal dari kesepakatan kelompok masyarakat, tanpa memandang status pendidikan dan pengalaman. Perbedaan lainnya, delegasi mewakili suara kelompoknya, tapi, tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri atas nama kelompok. Artinya begini, keputusan-keputusan seorang delegasi harus berasal dari kesepakatan-kesepakatan yang berasal dari kelompoknya. Sederhananya, delegasi hanya semacam juru bicara saja. Dia tidak memiliki kewenangan apapun, selain hanya sebagai penyambung lidah rakyat.

d. Mandat

Teori-teori baru tentang model perwakilan terus saja bermunculan. Yang paling luas pengaruhnya dari teori baru ini adalah tentang mandat. Idennya, untuk memenangkan sebuah pemilihan, rakyat menyerahkan mandat suaranya kepada partai. Singkatnya, partai memperoleh mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan apa saja kebijakan atau program yang telah

digariskan selama masa kampanye. Karena ini adalah partai, bukan politisi-politisi secara individu. Ini berarti, para politisi melayani konstituen mereka bukan dengan berpikir menurut pemikiran mereka sendiri atau bertindak sebagai atas nama rakyat, tetapi loyalitasnya pada partai mereka dan kebijakan-kebijakannya. Karena rakyat sudah memberikan mandat sepenuhnya kepada partai, dengan memilihnya sesuai dengan visi-misi dalam masa kampanye (Heywood, 1997, 353).

e. Model Kemiripan

Gagasan model perwakilan yang mengutamakan kemiripan ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa hanya individu yang berasal dari sebuah kelompok tertentu dan memiliki pengalaman sama dengan kelompoknya tersebut, yang dapat sepenuhnya mengerti dan pasti akan memperjuangkan kepentingan kelompoknya, ketika mereka nanti berada di lingkaran kekuasaan. Gagasan kemiripan ini menitikberatkan pada kesamaan identitas, baik dalam bentuk identitas suku, identitas agama, identitas ekonomi, identitas profesi dan sebagainya. Sebagai contoh, seorang pria yang walaupun pro terhadap kebijakan feminisme, dianggap tidak akan mungkin berjuang sepenuhnya bagi kepentingan kaum wanita. Hanya kaum wanita-lah yang paling memahami persoalan mereka dan pasti paling serius mengangkat persoalan feminisme itu. Contoh lainnya, hanya orang kulit hitam yang paling mengerti problem kaumnya dari pada orang kulit putih. Sehingga, orang kulit hitam yang dipilih mewakili mereka dipemerintahan dipastikan akan lebih serius memperjuangkan kepentingan orang kulit hitam, ketimbang orang kulit putih.

C. Partisipasi Politik

1. Defenisi Partisipasi Politik

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala

tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.²¹

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).²²

Millbrath dan Goel (1997) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah peran sosial masyarakat yang semakin memahami politik dan mereka yang secara individual termasuk dalam masyarakat “terdidik” serta memiliki keterampilan demokratis.²³

Herbert McClosky (1972: 252) dalam *Internal Encyclopedia of the social Sciences* mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dan warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.²⁴

Ali Jalbi dalam Ustman Abdul Muiz Ruslan (2010:99), partisipasi politik merupakan aktivitas yang dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memberi andil dalam menggariskan tujuan-tujuan umum kehidupan masyarakat tersebut, dan dalam menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya. Hal itu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan politik langsung misalnya pencalonan diri

²¹ Sahran Raden, Intam Kurnia, dan Randi Atma R Massi, *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah)* (Yogyakarta: Cakrawala Yogyakarta, 2019), hal. 16.

²² Bakti et al., hal. 44.

²³ Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik* (Makassar: CV. Sah Media, 2016), hal. 73.

²⁴ Heryanto, *Panggung Komunikasi Politik: Dilema Antara Idealitas dan Realitas Politik*, hal. 29.

dalam pemilihan umum, diskusi problematik umum, ikut dalam kampanye-kampanye politik atau melalui kegiatan-kegiatan politik tak langsung.²⁵

Berdasarkan definisi partisipasi politik dari para pakar ilmu politik, secara eksplisit mereka memaknai partisipasi politik bersubstansi *core political activity* yang bersifat personal dari setiap warganegara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penetapan kebijakan publik.²⁶

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain.²⁷

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut pendapat beberapa ahli beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:²⁸

a. Status sosial dan ekonomi

Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik (Surbakti, 1992).

²⁵ Hariyanti dan Hambali, hal. 26.

²⁶ Raden, Kurnia, dan Massi, hal. 20.

²⁷ Sakti, hal. 39.

²⁸ Raden, Kurnia, dan Massi, hal. 21–22.

b. Situasi

Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi faktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman (Surbakti, 1992).

c. Afiliasi politik orang tua

Afiliasi berarti bergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992).

d. Pengalaman berorganisasi

Organisasi merupakan suatu system yang mengatur kehidupan masyarakat atau bias diartikan sebagai suatu perilaku yang terpolo dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama (Simangunsong, 2004).

e. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat diahidup (Hendrik, 2010).

f. Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan (Hendrik, 2010).

g. Stimulan partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi Informal (Hendrik, 2010)

3. Jenis-Jenis Partisipasi Politik

Partisipasi politik, dapat dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif.²⁹

- a. Partisipasi aktif merupakan kegiatan mengajukan usul mengenai suatu kebijakan, mengajukan kritik terhadap suatu kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin atau pemerintahan.
- b. Partisipasi pasif merupakan kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan apa saja yang diputuskan pemerintah.

4. Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Huntington dan Joan M. Nelson (1984), partisipasi dapat terwujud dalam berbagai bentuk yaitu:³⁰

- a. Pertama, kegiatan pemilihan mencakup memberikan suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. Kedua, *lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Ketiga, kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Keempat, mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

²⁹ Bakti et al., hal. 45–46.

³⁰ Bakti et al., hal. 45.

Sementara bentuk partisipasi politik menurut Verba, Nie, Brady (1995) terbagis atas dua model yaitu model konvensional dan model non-konvensional.³¹

a. Model Konvensional

- 1) Melakukan pemungutan suara (*voting*)
- 2) Bekerja dan berkontribusi dalam kampanye pemilihan umum *electoral* dan giat dalam organisasi politik
- 3) Melakukan kontak (menjalin hubungan) dengan pejabat politik
- 4) Menghadiri rapat atau pertemuan yang bersifat politik
- 5) Membentuk organisasi kerjasama sosial
- 6) Memberikan pelayanan tanpa harus mengharapkan imbalan (insentif) dalam kegiatan pemilihan lokal dan komite pelaksana pemilihan umum
- 7) Aktif dalam kegiatan politik dengan melakukan mediasi kepada kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan, dan
- 8) Memberikan kontribusi dalam bentuk dana untuk meningkatkan respon politik masyarakat untuk memenangkan salah satu kandidat yang mereka sukai.

b. Model Non-Konvensional

- 1) Demonstrasi dan boikot Pemilu
- 2) Anarkis dan melawan hukum

Tekanan sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³¹ Halim dan Lalongan, hal. 76–77.